

## **Stovia Dalam Pergerakan Nasional Di Indonesia**

**I Gede Wayan Wisnuwardana**  
Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali  
[igedewayanwisnuwardana@gmail.com](mailto:igedewayanwisnuwardana@gmail.com)

### **Abstrack**

*Aim the research was for uncovered Hindia's youths condition in the begining twentieth centuries about nationality comprehension problems. This article used historical method, who had four stages. There are to collect the historical sources, sources critically, interpretation, and historiography. The emerge consciousness at that nationality was revired by discriminations and differences of nobleman and people, and existence the ethical politics especially education. Limited of education system was open the conception of STOVIA's youths to moved to struggle people in order to become reasonable life of man.*

**Key words:** *education, nationalism, STOVIA.*

## Pendahuluan

Periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan suatu babakan penting dalam sejarah Indonesia, karena pada periode tersebut mulai muncul manusia-manusia dengan kesadaran baru yang menginginkan suatu kehidupan yang pantas bagi bangsanya. Keinginan yang masih samar-samar ini merupakan semboyan Soetomo di dalam pidatonya pada saat kelahiran BO pada tanggal 20 Mei 1908. Ia menyadari bahwa cita-cita itu tidak akan dapat terwujud jika hanya diperjuangkan oleh para pelajar saja. Oleh karena itu, dengan sadar ia mengajak kepada teman-temannya agar membicarakan gagasan itu di dalam lingkungan rumah tangga mereka, dengan para orang tua agar dapat menggugah perhatian mereka terhadap kemajuan bangsa.<sup>1</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, keinginan itu menjadi semakin mengkrystal, menjadi sebuah cita-cita luhur anak bangsa yang menginginkan

kemerdekaan bangsanya dari belenggu penjajahan Belanda yang telah sekian lama menguasai bumi Indonesia. Munculnya kesadaran ini antara lain dipicu oleh adanya diskriminasi-diskriminasi dan perbedaan antara priyayi dan rakyat yang semakin tajam, serta adanya penerapan politik etis, terutama bidang pendidikan. Politik ini dijalankan oleh Pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia sebagai upaya untuk membalas jasa atas perlakuan mereka yang telah memeras kekayaan bangsa Indonesia selama ini.<sup>2</sup>

Gagasan politik Etis ini dilatarbelakangi oleh adanya artikel karya C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Hindia selama tahun 1800-1897, yang berjudul “*Een Eereschuld*” (Suatu hutang kehormatan) di dalam *de Gids*, majalah berkala Belanda. Dinyatakannya bahwa Negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas negeri mereka. Hutang ini sebaiknya dibayar dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan

<sup>1</sup>Margono Djojohadikoesoemo, *Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis*, Terjemahan: Drs. Muhammad Rajab, (Jakarta: PT. Indira, tt), hlm.34.

<sup>2</sup>Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Terjemahan: Zahara Deliar Noer, Cet. I, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 22.

rakyat Indonesia di dalam menerapkan kebijaksanaan. Politik Etis Jajahan ini dicanangkan pada pidato tahunan Kerajaan Belanda pada bulan September 1901 yang berisi “suatu kewajiban yang luhur dan tanggungjawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda”. Pesan kerajaan ini dilanjutkan dengan menyatakan keprihatinan terhadap keadaan ekonomi yang buruk di Hindia Timur dan meminta agar dibentuk komisi untuk memeriksa keadaan ini.<sup>3</sup>

Politik Etis yang dijalankan ini meliputi tiga upaya untuk menyejahterakan bangsa Indonesia, yaitu sistem irigasi, emigrasi atau transmigrasi, dan pendidikan. Sebenarnya tujuan kaum Liberal sebagai pencetus ide ini bagus, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Akan tetapi, pada pelaksanaannya semua kembali bermuara kepada kepentingan ekonomi di pihak Pemerintah Hindia Belanda. Maksudnya segala peningkatan kesejahteraan rakyat itu tetap dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan bukan bagi kemakmuran rakyat itu sendiri.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

Contoh pelaksanaan Politik Etis yang menguntungkan pihak Pemerintah Hindia Belanda adalah dibukanya perkebunan-perkebunan tebu di Jawa yang disertai dengan sistem irigasi yang bagus. Akan tetapi, mereka menggunakan tanah-tanah rakyat yang mereka sewa dengan harga yang rendah serta menggunakan tenaga rakyat yang mereka bayar rendah pula. Dengan demikian, adanya irigasi itu bukan untuk meningkatkan produksi para petani, tetapi justru dimanfaatkan sendiri untuk Pemerintah Hindia Belanda.<sup>4</sup> Selain itu dibukanya perkebunan-perkebunan tembakau di Deli yang menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Jawa dengan pertimbangan bahwa penduduk di Jawa sudah padat dan mereka lebih terampil bekerja dari pada penduduk setempat, mengakibatkan adanya transmigrasi dalam beberapa gelombang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Sukarto, “Dari Kerja Wajib sampai Kerja Upahan: Tenaga Kerja oleh Perkebunan di Yogyakarta, 1830-1930”, *Lembaran Sejarah*, Vol.I, No.1, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1997), hlm. 26-43.

<sup>5</sup>Karl J. Pelzer, *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947*, Terjemahan: J. Rumbo, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Harapan,)

Adapun pendidikan formal yang mereka tawarkan kepada penduduk pribumi pada mulanya hanya untuk memenuhi pegawai administrasi yang semakin mereka perlukan dan yang dapat mereka bayar dengan murah.

Sebenarnya perhatian masalah pendidikan formal di Hindia Belanda, terutama di Jawa, telah ada sejak tahun 1818 dengan adanya peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa penduduk bumiputra diperbolehkan untuk sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Selanjutnya pemerintah akan menetapkan peraturan-peraturan mengenai tata tertib yang diperlukan sekolah-sekolah bagi penduduk bumiputra itu. Akan tetapi, ternyata kondisi politik di Jawa tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk dapat segera merealisasikan peraturan itu. Hal ini diakibatkan oleh adanya perang Jawa dan *Cultuur Stelsel* yang sangat menyita perhatian pemerintah. Baru pada tahun 1848 peraturan itu dapat

terrealisasikan.<sup>6</sup> Sifat pendidikan yang ditawarkan ini berbeda dengan pendidikan pada awal abad ke-20, karena pendidikan di sini lebih diutamakan bagi calon pegawai dinas pemerintahan dan tanggungjawabnya diserahkan kepada bupati setempat. Baru pada tahun 1854 tanggungjawab pendidikan bumiputra secara tegas diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, kaum misionaris Katolik sejak tahun 1814 dan kemudian kaum misionaris Protestan sejak tahun 1851 juga telah melakukan keaktifan di Jawa terutama di bidang pendidikan. Pada tahun 1848 di setiap kabupaten didirikan sebuah sekolah setahun, menjadi dua, dan pada tahun 1852 menjadi 15 sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi pembatasan sekolah hanya untuk kalangan anak-anak Kristen saja, akan tetapi sudah sampai pada kebutuhan personil Gubernemen.<sup>7</sup>

Pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1892, sekolah-sekolah bumiputra

---

6I.J. Brugmans, "Politik Pengajaran", dalam H.Baudet dan I.J. Brugmans (Penyunting), *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Terjemahan: Amir Sutaarga, Ed. I, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia), hlm. 178-179.

7Loc.cit.

dipecah menjadi dua kelompok. Sekolah “kelas satu” merupakan sekolah istimewa bagi anak-anak pemuka rakyat atau orang-orang bumiputra yang terhormat atau kaya. Sekolah ini memberikan pendidikan selama 5 tahun dengan penambahan beberapa mata pelajaran seperti ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat, menggambar dengan tangan, dan ilmu ukur tanah. Biaya sekolah maupun tingkatan tenaga pengajarnya lebih tinggi dari pada sekolah “kelas dua”. Sedangkan sekolah “kelas dua” diperuntukkan bagi penduduk bumiputra pada umumnya. Sekolah ini ditempuh selama 3 tahun pelajaran dan hampir tak berbeda dengan sekolah bumiputra terdahulu yang hanya sekedar memberi pelajaran menulis, membaca, dan berhitung.

Pelajaran sekolah “kelas satu” yang lebih unggul dari pada sekolah “kelas dua” itu ternyata tidak cukup untuk menempuh ujian *kleinambtenaar* (pegawai rendah). Untuk menempuh ujian itu diperlukan Bahasa Belanda yang hanya diberikan di sekolah rendah Eropa (*Europeesche Lagere School*). Sekolah ini sangat menarik karena dapat memberikan keuntungan materiil pada lulusannya, pada hal hanya sejumlah

kecil anak-anak bumiputra yang diterima di sekolah ini. Mereka tidak hanya diharuskan membayar lebih tinggi, tetapi juga harus mengetahui tata bahasa Belanda. Oleh karena itu, hanya kalangan bangsawan ataslah yang dapat menikmati pendidikan itu. Salah satu contohnya adalah Pangeran Ario Tjondronagoro IV, Bupati Kudus (1835), yang kemudian menjadi Bupati Demak pada tahun 1850-1866. Beliau adalah bupati pesisiran yang pertama kali memasukkan pendidikan Barat bagi putra-putrinya dengan jalan memanggil seorang guru privat bangsa Belanda, C.E. Kesteren, seorang bangsawan Belanda yang berfaham progresif, yang pada waktu itu menjabat sebagai redaktur surat kabar *de Lokomotif* di Semarang.<sup>8</sup>

Kondisi sosial masyarakat Jawa pada awal abad ke-20 ini diwarnai dengan adanya perbedaan-perbedaan hak pada masing-masing masyarakatnya diakibatkan oleh adanya penggolongan-penggolongan masyarakat berdasarkan

---

<sup>8</sup>*de Lokomotif* tanggal 15 Maret dan 25 Maret 1864 dalam Soekesi Soemoatmojo, “Gaya Hidup Bupati Pesisiran Pada Akhir Abad 19 sampai Permulaan Abad 20”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985), hlm. 5.

kelas-kelas yang menyulitkan untuk saling berinteraksi antara kelas satu dengan lainnya tanpa dibebani unsur ewuh pekewuh, rasa sungkan, terutama dari kelas sosial yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Dinding yang membatasi masing-masing kelas ini juga ditunjang oleh budaya dan bahasa Jawa yang memiliki jenjang pemakaian berdasarkan kedudukan si penutur terhadap lawan bicaranya.<sup>9</sup>

Selain itu keadaan masyarakat Jawa juga menjadi semakin terbelakang dan tertinggal dari bangsa-bangsa asing lain di Jawa. Pada tanggal 17 Maret 1900, bangsa Tionghoa di Hindia mendirikan perkumpulan *Tiong Hwa Hwee Kwan*, dengan tujuan sebagai protes terhadap keputusan pemerintah tahun 1899 yang memberikan kedudukan bangsa Jepang sama dengan bangsa Eropa. Organisasi ini maju dengan pesatnya disertai dengan adanya dana yang penuh sehingga

<sup>9</sup>Di Jawa dikenal adanya bahasa *kromo inggil*, bahasa Jawa sangat halus yang harus digunakan kepada lawan bicara yang mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bahasa *kromo madya* merupakan bahasa Jawa halus yang digunakan kepada lawan bicara yang mempunyai status sosial sama atau lebih rendah. Bahasa *ngoko* adalah bahasa Jawa kasar yang digunakan kepada lawan bicara yang kedudukannya sosialnya lebih rendah dari pada si penutur. Periksa: Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, Terjemahan: Hersri, Cetakan I, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 23-27.

berhasil memajukan masyarakat Tionghoa yang ada di Jawa. Sementara itu *deIndische Bond* (Persatuan Hindia), yaitu organisasinya kaum Indo mulai bergerak. Mereka menutup pintu bagi kaum bumiputra, dan memperjuangkan dirinya sendiri. Karena kedua organisasi itu maju dan berhasil, maka mereka meremehkan bangsa bumiputra. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan nasib rakyat yang ditinggalkan oleh pemimpinnya itu. Pada waktu itu pula, komunitas Arab di Batavia pada tahun 1905 telah mendirikan *Jam'iyat Khair* (Perserikatan bagi Kebaikan). Salah satu kegiatannya adalah membuka sebuah sekolah moderen yang pelajarannya diberikan dalam bahasa Melayu.<sup>10</sup>

Kemunculan Sekolah Dokter Jawa yang kemudian namanya berubah menjadi STOVIA ini ternyata mampu merubah sejarah bangsa Jawa, sebuah bangsa yang penakut dan selalu patuh pada atasan, menjadi bangsa yang mempunyai kepribadian. Keadaan ini tidak lain disebabkan oleh adanya sistem

<sup>10</sup>Goenawan Mangoenkoesoemo, "De Geboorte van Boedi Oetomo", *Soembangsih*, Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908-20 Mei 1918, Tijdschrift Nederland Indie Oud & Nieuw, Amsterdam, 1918, hlm. 8.

pendidikan. Meskipun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat bumiputra, tetapi ternyata mampu membuka cakrawala baru. Keadaan masyarakat Jawa yang semakin terbelakang dan tertinggal dari bangsa-bangsa asing lain di Jawa, semakin diberinya batasan antara golongan priyayi dan rakyat dengan mendirikan sekolah untuk perwira bumiputra yang hanya boleh dimasuki oleh anak-anak priyayi saja, serta perasaan takut para pembesar terhadap atasannya baik atasan bumiputra maupun Belanda, ternyata mendapat perhatian sebagian kecil siswa-siswa STOVIA itu.<sup>11</sup>

### **STOVIA: Ladang Persemaian Sikap**

Sekolah Dokter Jawa didirikan Pemerintah Hindia Belanda karena pemerintah merasa kewalahan menghadapi wabah yang menyerang di daerah Jawa, terutama Banyumas, pada tahun 1800-an, dan berdasarkan pertimbangan bahwa mendidik penduduk bumiputra untuk menjadi mantri cacar lebih murah dari pada membayar tenaga dokter Eropa. Sekolah ini berada di

---

<sup>11</sup>*Loc.cit.*

Weltevreden, pusat kota Batavia. Di dalam perkembangannya sekolah ini mengalami perubahan-perubahan baik dalam syarat-syarat penerimaan siswa, kurikulum, lama studi, maupun gelar yang diperoleh. Berdasarkan kebijakan pada tahun 1903, yaitu diperkenalkannya seluruh anak-anak di wilayah Hindia Belanda untuk memasuki sekolah itu, maka nama sekolah itu kemudian dirubah menjadi *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputra) yang disingkat STOVIA.<sup>12</sup>

Ketika kebutuhan pemerintah terhadap tenaga kesehatan semakin meningkat, pemerintah membantu kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh. Pada awalnya Pemerintah Hindia Belanda sendiri yang berusaha untuk menarik minat para pemuda dari keluarga baik-baik untuk meningkatkan pendidikannya dengan jalan memberi iming-iming sejumlah beasiswa dan perumahan gratis.<sup>13</sup> Sebagai imbalannya, mereka harus bersedia masuk pada dinas

---

12A. de Waart, *Tujuh Puluh Lima Tahun Pendidikan Kedokteran di Weltevreden 1851-1926*, Terjemahan: Bintari Rukmono, dkk., (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1995).

pemerintah, antara lain sebagai “mantri cacar”.<sup>14</sup> Akan tetapi, karena tradisi para priyayi memandang rendah terhadap pekerjaan-pekerjaan praktis seperti dokter dan guru, maka hanya sedikit saja priyayi yang tertarik pada sekolah itu.

Oleh karenanya, pada tahun 1891 pemerintah mengumumkan bahwa setiap anak muda yang ingin memperoleh pendidikan sebagai Dokter Jawa diperbolehkan masuk di sekolah dasar Eropa secara gratis, dengan persyaratan bahwa anak muda itu harus cerdas, berasal dari keluarga priyayi, dan berumur tidak lebih dari tujuh tahun. Mereka akan diterima sebagai siswa ELS

---

<sup>13</sup>Hanafiah menceritakan bahwa setiap pelajar menerima uang saku sebesar 15 *gulden* sebulan dan mendapatkan tambahan 2,5*gulden* setiap tiga tahun hingga akhirnya 20 *gulden* per bulan. Biaya sebesar itu digunakan untuk ongkos makan dan untuk memenuhi kebutuhan harian seorang pelajar. Sedangkan Soemohamidjojo menyatakan bahwa beasiswa yang diterima oleh seorang mahasiswa di kedokteran sebesar 8 *gulden* sampai 20 *gulden* per bulan, hampir dua kali lipat dari yang diterima oleh seorang magang yang bekerja sebagai juru tulis. Periksa: Soemohamidjojo, “Hal Dokter Djawa”, *Pewarta Prijaji*, Jilid 1-2, 1900-1901, hlm. 215; Margono Djojohadikoesoemo, *op.cit.*, hlm.

<sup>14</sup>SK Gubernemen tanggal 2 Januari 1849 No. 22 tentang pendidikan kesehatan bagi pemuda Jawa, dalam M.A. Hanafiah S.M., *ibid.*, hlm. 1.

secara gratis dengan persetujuan diam-diam sesudah lulus dari sekolah itu akan menempuh ujian yang berat untuk masuk di Sekolah Dokter Jawa.<sup>15</sup> Ternyata kebijakan baru itu banyak menarik perhatian kalangan anak-anak priyayi rendah dari pada anak-anak priyayi tinggi. Kerena jika mereka berhasil mendapatkan gelar Dokter Jawa itu, maka status sosial mereka akan terangkat dari tingkat sebelumnya.<sup>16</sup>

Pada mulanya ELS hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan bagi anak-anak bumiputra dari golongan tertentu dalam jumlah yang terbatas. Misalnya anak anak bupati, patih, wedana, jaksa, dan lainlainnya, yang haknya disamakan dengan orang Eropa. Akan tetapi, sejak tahun 1864 seiring dengan semakin tingginya kebutuhan pemerintah terhadap tenaga-tenaga yang berpendidikan dan mahir berbahasa Belanda, maka sekolah ini juga terbuka bagi murid-murid yang pintar, yang orang tuanya tidak termasuk dalam golongan

---

<sup>15</sup>Peraturan ini berlaku hingga tahun 1915. Periksa: A.M. Hanafiah, *ibid.*<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*, Seri Terjemahan KITLV-LIPI, Cetakan I, (Jakarta: PT Temprint, 1989), hlm. 43.

tersebut di atas. Dengan diperbolehkannya anak-anak bumiputra memasuki sekolah ini, meskipun dengan persyaratan tertentu dan terbatas pada golongan tertentu pula, Pemerintah Kolonial Belanda merasa tidak menerapkan diskriminasi rasial dalam menjalankan politik pengajarannya. Meskipun demikian, pada prakteknya banyak sekali diskriminasi yang dilakukan guru-guru Eropa itu terhadap siswa bumiputra.<sup>17</sup>

Sebenarnya pilihan menjadi Dokter Jawa pada awal abad ke-20 merupakan suatu sikap yang bertentangan dengan arus zaman, yaitu suatu zaman yang selalu mengedepankan pada keinginan untuk menjadi pegawai pangreh praja yang akan menjadikannya sebagai seorang priyayi yang berkuasa, disegani, dan disembah-sembah. Tidak demikian halnya dengan pekerjaan yang memerlukan keahlian ini. Meskipun sekolah kedokteran membebaskan para mahasiswanya dari kewajiban membayar uang sekolah dan menerima gaji yang

tinggi sesudah lulus,<sup>18</sup> kedudukan kedudukan yang menarik itu tidak menyebabkan bertambah besarnya jumlah priyayi muda yang menuntut ilmu di bidang ini.

Kemungkinan hal itu disebabkan karena seleksi penerimaan mahasiswanya yang terlalu ketat serta kewajiban belajar yang ekstra keras yang menjadi penghalang peminatnya dari kalangan priyayi muda ini. Selain itu, sikap para priyayi pada waktu itu selalu menganggap bahwa Sekolah Dokter Jawa atau STOVIA adalah sekolah untuk orang miskin. Penilaian semacam itu terjadi karena pemerintah menerapkan sistem beasiswa, menggratiskan biaya pendidikan dan pemondokan, bagi mahasiswa STOVIA. Oleh karena itu, hanya orang tua yang kurang mampu yang berminat mengirimkan anaknya ke sekolah tersebut. Akan tetapi, justru di kalangan anak-anak miskin inilah muncul

---

<sup>17</sup>Periksa: I.J., Brugmans, *op.cit.*, hlm. 184 dan Margono Djojohadikoesoemo, *op.cit.*, hlm. 14.

---

<sup>18</sup>Seorang dokter Jawa berpenghasilan antara 70 sampai 150 *gulden* per bulan. Sebagai perbandingannya seorang asisten wedana, kedudukan tertinggi dalam pemerintahan yang dapat dicapai tanpa kesulitan oleh seorang priyayi bukan ningrat yang pandai, akan memperoleh gaji paling banyak 150 *gulden* per bulan. Adapun gaji seorang magang lulusan Sekolah Kepala (OSVIA) hanya 10 *gulden* per bulan. Periksa: J. Habbema, "Inlandsche bestuursambtenaren op Java", *Indische Gids*, Jilid 34, bagian 2, 1912, hlm.880.

tokoh-tokoh nasional Indonesia yang militan, baik di bidang kedokteran maupun pejuang sejati.

Kunci dari munculnya tokoh-tokoh nasional Indonesia yang militan dari STOVIA itu rupanya tak terlepas dari tempat sekolah ini berada. Weltevreden adalah sebuah pusat kota Batavia. Pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta sebuah kota besar di Hindia yang merupakan pintu gerbang dengan dunia luar. Di lingkungan inilah berkumpul para intelektual yang memungkinkan di antara mereka untuk saling berinteraksi dan saling bertukar pikiran mengenai berbagai hal. Para pelajar STOVIA yang kebanyakan berasal dari kota-kota kecil itu memperoleh dorongan intelektual dari kota besar dan modern di lingkungan sekolahnya. Batavia juga menjadi kediaman suatu kelompok intelektual non pribumi, yang tidak besar tetapi sedang tumbuh. Oleh karena itu wajarlah jika para pelajar STOVIA bergaul dengan para intelektual itu dengan akibat terpengaruh oleh ide-ide mereka.

Tempat yang paling disenangi sebagian pelajar STOVIA adalah perpustakaan milik Douwes Dekker,

seorang Indo yang sangat mendukung politik etis. Ia tinggal di dekat STOVIA. Bagi sebagian pelajar STOVIA keberadaan Douwes Dekker mempunyai arti penting. Ia adalah seorang intelektual yang rumahnya selalu terbuka sebagai tempat pertemuan, memiliki ruang baca, dan perpustakaan.<sup>19</sup> Di perpustakaan itu tersedia banyak buku bacaan dan terbuka bagi pelajar bumiputra.

Douwes Dekker pula yang menyebabkan pelajar-pelajar STOVIA seperti Tjipto Mangoenkoesoemo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Surjopranoto, serta Tjokrodirdjo, mulai belajar menuangkan gagasan-gagasannya dalam surat kabar. Hal ini memungkinkan karena pelajar-pelajar tersebut dipilih oleh Douwes Dekker sebagai pembantu redaksi *Bataviaasch Nieuwesblad*, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang dipimpinnya.<sup>20</sup> Ada alasan tertentu yang menyebabkan ia memilih para pelajar itu. Terutama adalah kemampuan berbahasa Belanda dan ketrampilan menuangkan

---

<sup>19</sup>R. Soetomo, *Kenang-Kenangan*, (Soerabaia: S.W., 1934), hlm. 86.

<sup>20</sup>Soebagyo I.N., *Jagat Wartawan Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hlm. 573.

gagasan yang bagus, serta ketajaman penglihatan para pelajar itu dalam melihat kondisi sosial di lingkungan sekitarnya. Kemampuan yang mereka miliki itu sangat diperlukan untuk memperpanjang kelangsungan hidup sebuah surat kabar yang selalu menyajikan berita-berita aktual.

Perjumpaan para pelajar yang gelisah di perpustakaan Douwes Dekker ini akhirnya membuahkan suatu polemik yang ditulis oleh Goenawan Mangoenkoesoemo, yang berturut-turut dimuat dalam *JavaBode*, sebuah harian berbahasa Belanda di Batavia. Polemik yang ditulis pada tahun 1905 itu berisi tentang kecemanya terhadap tingkah laku dan adat Jawa yang dianggapnya sebagai perintang modernisasi.<sup>21</sup> Pada tahun 1905 dan tahun-tahun sebelumnya, dunia priyayi terutama yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah pribumi sangat dihormati oleh rakyat. Terdapat garis pemisah yang tegas antara priyayi dan bukan priyayi. Perbedaan itu selalu kelihatan jelas serta selalu mengikat. Dalam keadaan apa pun suasana

---

<sup>21</sup>*Retnodhoemilah*, 1905, Thn. 11, No. 42;43.

penghormatan itu sangat nyata. Goenawan menginginkan adanya perubahan keadaan adat-istiadat dan tata cara dalam masyarakat. Menurutnya adat yang dibuat oleh manusia itu dapat dirubah oleh manusia juga. Akan tetapi, semua itu diserahkan kepada kaum priyayi agar dapat memberikan contoh dalam membuang adat yang membuat susah itu. Adat yang telah membelenggu itu telah menjadikan bangsa Jawa tertinggal dibandingkan dengan bangsa Arab dan Tionghoa. Kedua bangsa asing itu masing-masing telah sadar terhadap perlunya persatuan untuk meningkatkan kedudukan mereka di dalam masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian. Sementara rakyat Jawa kebanyakan merupakan masyarakat miskin dan penuh dengan penghinaan bangsa-bangsa lainnya.

Anak bangsa telah bangkit, ia mulai berani menyuarakan isi hati yang biasanya disimpannya rapat-rapat agar orang lain tidak dapat mengetahui, sebuah sikap pengendalian diri dari budaya khas Jawa. Anak bangsa telah memiliki kepribadian, telah mempunyai sikap, dan dapat menilai serta menyuarakan dengan jujur sesuai dengan

hati nuraninya. Api kesadaran itu sedikit demi sedikit mulai muncul di kalangan pemuda terpelajar yang dapat melihat diskriminasi-diskriminasi yang ditimbulkan oleh adat dan tradisi Jawa yang penuh dengan tatanan feodal serta tahyul yang berlebih-lebihan. Hal itulah yang mengakibatkan sulitnya manusia Jawa untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Kondisi masyarakat yang seperti itulah yang selalu menjadi bahan perbincangan para pelajar STOVIA. Mereka sering memperbincangkan berita-berita yang dimuat dalam koran *de Locomotief*, *Bataviaasch Nieuwesblad*, *Java Bode*, Pemberita Betawi, dan majalah *Jong Indie*.

Api semangat itu semakin membara terlebih lagi setelah diketahui adanya berita yang menyatakan bahwa Revolusi Turki yang terjadi pada permulaan tahun 1908 yang digerakkan oleh *The Young Turks* dapat menggoyahkan feodalisme Turki.<sup>22</sup> Kejadian-kejadian ini besar sekali pengaruhnya bagi kalangan terpelajar bumiputra, suatu kelompok kecil lapisan

baru dalam masyarakat bumiputra. Pergulatan-pergulatan pemikiran mengenai nasib rakyat yang selalu tertindas itu sering dilakukan oleh para pelajar STOVIA pada malam hari setelah kegiatan belajar mereka selesai. Berita-berita dari luar negeri tersebut di atas termasuk menjadi bahan perbincangan. Demikian pula kepincangan-kepincangan di dalam negeri, terutama di bidang pengajaran, pendidikan, perekonomian, dan kepangreh-prajaan kolonial menjadi bahan renungan.

Endapan-endapan pemikiran para pemuda yang menginginkan perubahan itu semakin mengental setelah kedatangan Dokter Wahidin Soedirohoesodo pada akhir tahun 1907 yang mengkampanyekan diadakan dana belajar untuk membantu para pelajar yang tidak dapat melanjutkan studinya. Dokter Jawa itu berpendapat bahwa lapisan bawah masyarakat itu perlu untuk diberi pengajaran yang sebaik-baiknya, karena perluasan pengajaran itu akan dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Gagasan Dokter Jawa itu telah membuka pikiran dan hati para pelajar STOVIA, serta mendatangkan cita-cita baru. Gagasan yang telah

---

<sup>22</sup>Singgih, "De Indonesische Studenten-Vrijesproken", *Timboel*, 15 April 1928.

dirumuskan itu kemudian diterapkan dengan membentuk suatu persatuan di antara orang-orang yang berkebudayaan sama, yaitu orang Jawa, Sunda, dan Madura, tanpa memandang kedudukan, kekayaan, atau intelektualitas sebagai salah satu syarat sebagai anggota, untuk dididik agar terjadi keharmonisan antara negara dan rakyat. Persatuan itu diharapkan dapat memberikan sesuatu untuk seluruh Pulau Jawa dan Madura sebagai suatu kesatuan geografi dan kultural. Dengan demikian, tujuan persatuan itu lebih luas dari sekedar beasiswa. Para pelajar itu berpendapat bahwa sebuah persatuan itu harus dapat berusaha memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Akhirnya tanggal 20 Mei 1908 ditetapkan sebagai lahirnya organisasi baru yang mereka namakan Boedi Oetomo, dengan tujuan untuk memperjuangkan nasib rakyat agar mempunyai kehidupan yang pantas.

### **Kesimpulan**

Para pelajar STOVIA adalah anak zaman kolonialisme yang hidup pada awal abad ke-20. Pendidikan Barat telah memungkinkan bagi mereka untuk membentuk kontak-kontak yang kuat

dengan dunia Barat. Terlebih lagi dengan kesukaan membaca, hubungan-hubungan sosial dengan tokoh-tokoh penting sezaman, maupun dengan teman-teman sehalauan, serta akibat dari kondisi kolonialisme di sepanjang perjalanan kehidupan mereka itu dapat digunakan untuk melacak proses perkembangan pemahaman mereka terhadap nasionalisme. Dua tokoh penting yang mempengaruhi sebagian pelajar STOVIA itu, yaitu Douwes Dekker, dan dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dengan demikian, keberadaan STOVIA sangat berperan penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Disamping kemampuan individu para pelajar STOVIA, pendidikan yang menanamkan disiplin tinggi bagi para pelajarnya ini mampu menyatukan pelajarnya dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Selain itu, keberadaannya di pusat kota menjadikan sekolah ini menjadi tempat persemaian nasionalisme yang bagus bagi para pelajarnya. Beberapa tokoh pergerakan nasional alumni STOVIA antara lain adalah dr. Wahidin Soedirohoesodo, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dr. Goenawan Mangoenkoesoemo, dan dr. Soetomo.

